



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

***PERATURAN
BUPATI NO
tentang
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH***

**KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU**

Jalan A.Yani No. 2 Ngijo, Tasikmadu
Telp. 0271-495027, Kode Pos 57761

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rohmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini dapat tersusun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD). Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 3 tahun dan juga instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Renstra Kecamatan Tasikmadu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Tasikmadu, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rohmad, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Tasikmadu.

Karanganyar, April 2023
CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, S.P.
Penata Tk I I
NIP. 19700909 199403 1 004

Daftar isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	I-1
Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tasikmadu.....	II-1
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....,.....	III-1
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII-1
Bab VIII Penutup.....	VIII-1

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Bahwa Peraturan Pemerintah ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 3 (tiga) tahun dan juga sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi bagi Kecamatan Tasikmadu, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Tasikmadu sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Program dalam RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu, mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode Renstra 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen akhir dari Periode RPJPD tersebut. RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar, sementara RPD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu saat ini.
- b. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPD Kabupaten

Karanganyar. RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi Pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.

- d. Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu ini. Oleh karena itu penyusunan nya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karanganyar.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 dengan dokumen RPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 harus selaras dan konsisten dengan target capaian, sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat mudah, transparan serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen Renstra dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 3 (tahun) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Tasikmadu untuk kurun waktu Tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan

akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tasikmadu untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Namun demikian, saat penyusunan Renstra ini, RPD juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang pelaksanaan tahunannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tasikmadu. Tahapan perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah

menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tigatahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Tasikmadu.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Tasikmadu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Tasikmadu, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tasikmadu, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Tasikmadu

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Kecamatan Tasikmadu dan cascading kinerja Kecamatan Tasikmadu.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tasikmadu dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENTRA) Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tasikmadu

Organisasi Pemerintah Kecamatan Tasikmadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Tasikmadu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tasikmadu

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tasikmadu yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

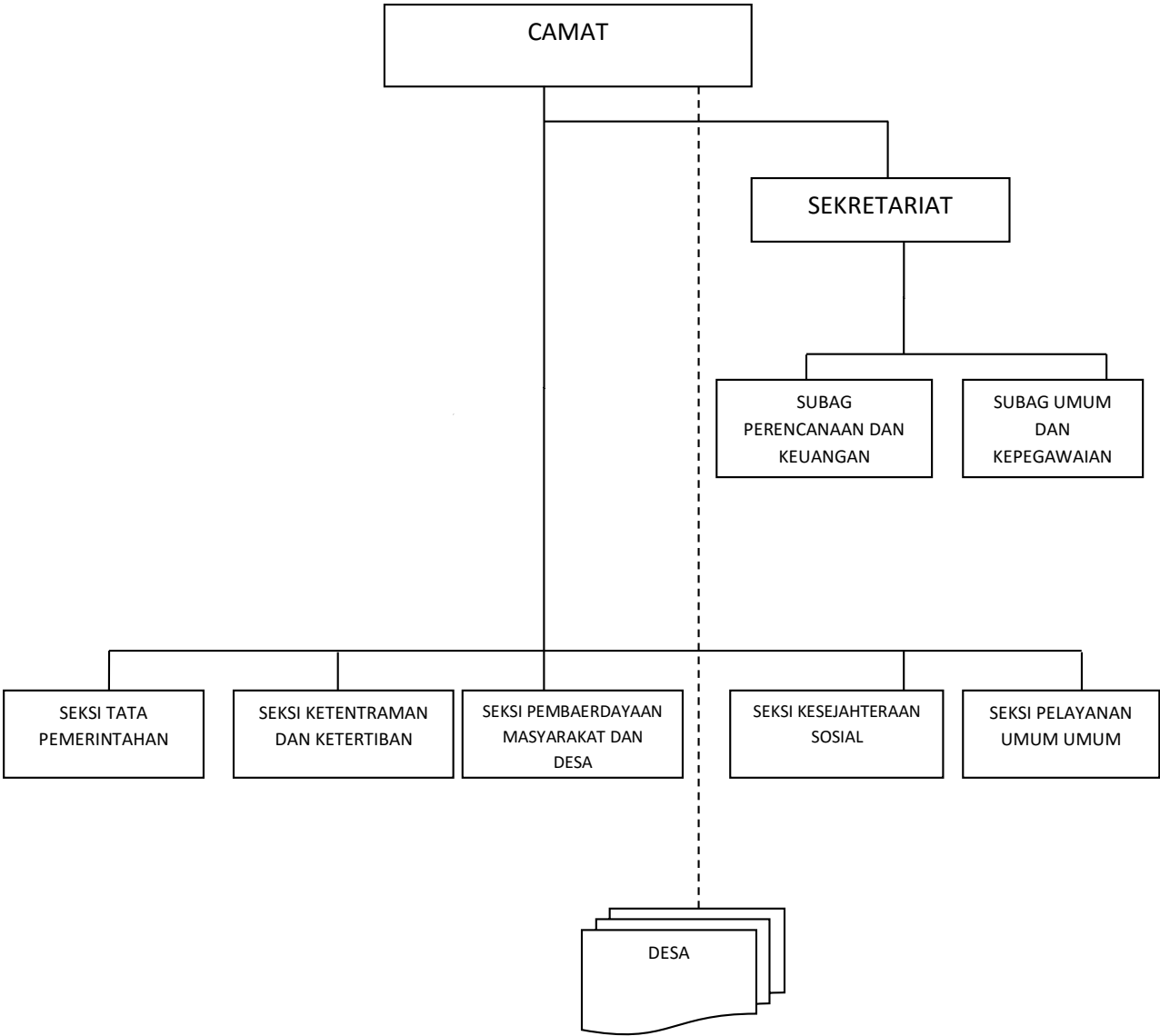
Susunan organisasi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;

- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Tasikmadu berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan

berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;

- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;

- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tasikmadu

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Tasikmadu berjumlah 36 orang, terdiri dari 15 orang (40,6 %) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 21 orang (59,4 %) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 22 orang (81 %) adalah pegawai laki-laki dan sebanyak 14 orang (19 %) pegawai perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD			
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	5	17	22
	D1		1	1
3	D3		2	2
4	S1	3	1	4
5	S2	7		7

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Tasikmadu (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 7 % (3 orang); berpendidikan S1 sebesar 19 % (4 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan D3 3 % (1 orang), pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 69 % (22 orang).

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	2
3	Golongan III	8
4	Golongan IV	5
5	Non PNS	21
	Jumlah	36

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Tasikmadu (2022)

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 13 orang ASN, Golongan II sebanyak 2 orang ASN, Golongan III sebanyak 8 orang ASN dan Golongan IV sebanyak 5 orang ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Tasikmadu mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas

lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tasikmadu. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Tasikmadu keadaan bulan Desember 2022 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Jenis aset	Satuan	Kondisi		Jumlah	ket
			baik	rusak	barang	
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	M2	baik		1.800	
2	Portable Genset	unit	baik		1	
3	Stasion Wagon/ Mobil	unit	baik		1	
4	Sepeda Motor	unit	baik		2	
5	Sepeda Motor	unit		rusak	2	
6	MesinTik	unit	baik		1	
7	Almari Besi/ Metal	buah	baik		16	
8	Rak kayu	unit		rusak	1	
9	Filling Besi/ Metal	buah	baik		19	
10	Lemari Kaca	buah	baik		1	
11	Buffet/Alat penyimpanan kantor lainnya	buah	baik		1	
12	Papan Visual	buah	baik		1	
13	Papan Pengumuman	buah	baik		1	
14	Lemari Kayu	buah	baik		1	
15	Meja Kayu/ Rotan	buah	baik		31	

16	Kursi Besi/ Metal/ Kursi Lipat	buah	baik		129	
17	Kursi Kayu/ Rotan	buah	baik		15	
18	Tempat Tidur Besi/ Metal	buah	baik		2	
19	Tempat tidur kayu	buah	baik		1	
20	Meja resepsionis	buah	baik		2	
21	Meja Panjang	buah	baik		1	
22	Kursi rapat/ plastik	buah	baik		75	
23	Kursi tamu	unit	baik		3	
24	Kursi Putar	buah	baik		20	
25	Kursi Biasa/ Bangku Tunggu	buah	baik		5	
26	Meja Komputer	buah	baik		3	
27	Meja ½ biro	buah	baik		21	
28	Sofa	unit		rusak	1	
29	Korden	M2	baik		20	
30	Seketsel/ penyekat	M2	baik		65	
31	Mesin Pemotong Rumput	Unit	baik		2	
32	Lemari Es	Unit	baik		2	
33	Kipas Angin	Unit	baik		6	
34	Kompore Gas	Unit	baik		1	
35	Televisi	Unit	baik		4	
36	Sound System	Unit	baik		2	
37	Unit Power Supply	Unit	Baik		3	
38	Mimbar/ Podium	Unit	Baik		1	
39	Alat Rumah Tangga Lainnya	buah	baik		2	
40	Komputer Unit/ PC Unit	unit	baik		8	
41	Laptop	unit	baik		10	
42	Monitor	unit	baik		1	
43	Printer	unit		rusak	2	
44	Printer	Unit	baik		10	
45	Meja Kerja Pejabat	unit	baik		1	
46	Meja Tamu	unit	baik		1	
47	Camera	unit	baik		1	
48	Proyektor	unit	baik		1	

49	Microphone	unit	baik		2	
50	Telephone (Fax)	unit	baik		1	
51	HT	Unit	baik		1	
52	Jartel	Unit	baik		1	
53	Rumah negara Gol I	Unit	baik		1	
54	Gedung kantor	unit	baik		1	
55	Penyemprot otomatis	unit	baik		2	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tasikmadu. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tasikmadu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya Nilai Sakip
- 2) Meningkatnya nilai Indeks kepuasan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Lembaga kemasyarakatan aktif
- 4) Meningkatnya wilayah dalam keadaan kondusif
- 5) Meningkatnya Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
- 6) Meningkatnya desa tertib perda

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Meningkatnya Nilai Sakip
 - a. Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan telah direncanakan dan dianggarkan sesuai kebutuhan dan telah dilaksanakan evaluasi setiap akhir bulan dan akhir tahun.
 - b. Administrasi Keuangan Daerah

Administrasi keuangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan telah mencukupi.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum mencakup kebutuhan-kebutuhan kantor antara lain Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Logistik kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan bacaan dan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi telah dilaksanakan dan tercukupi.

d. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Tasikmadu dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jasa penunjang untuk mencukupi kebutuhan kantor telah sesuai kebutuhan dan anggaran telah tercukupi.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Pemeliharaan barang untuk operasional kantor telah tercukupi, tetapi untuk Gedung kantor belum memadai untuk menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2) Meningkatnya nilai Indeks kepuasan Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tasikmadu sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi.

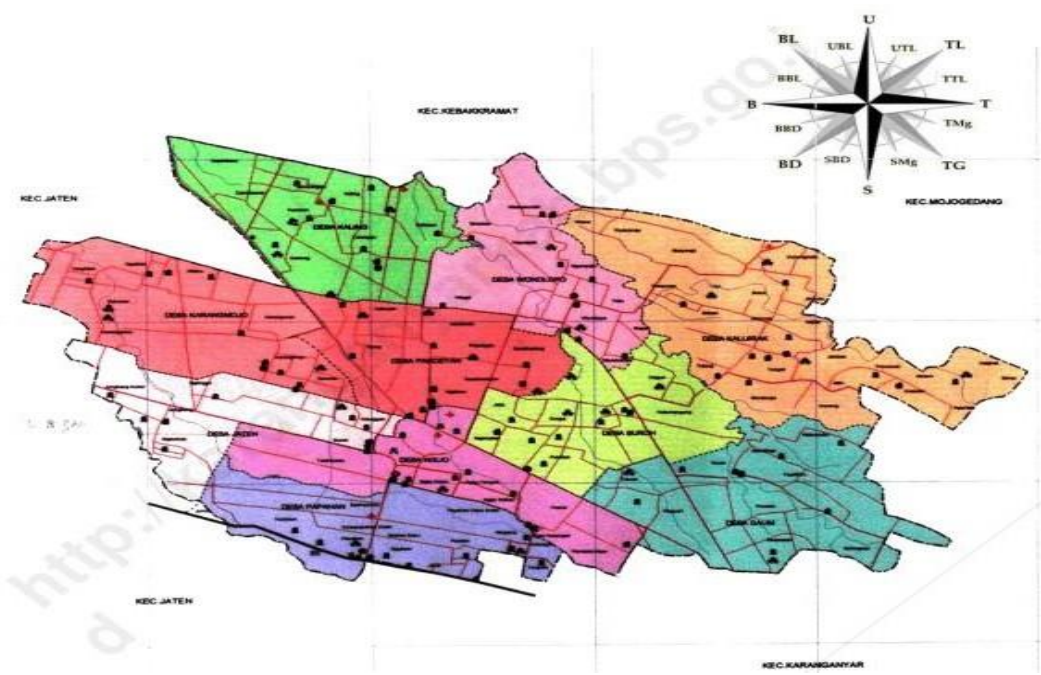
3) Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tasikmadu

Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibu kota kabupaten 21 km arah utara. Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 3,5 km Arah Selatan. Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 27,5973 km² dengan ketinggian rata-rata 123 m diatas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Tasikmadu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mojogedang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Kecamatan Jaten dan Kebakramat
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar

PETA KECAMATAN TASIKMADU



Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 2.759,7300 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.680,8991 Ha, dan luas tanah kering 1.078,8309 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.441,0566 Ha. ½ teknis 235,8200 Ha dan tadah hujan 4,0225 Ha. Sementara itu luas tanah untuk Pekarangan /bangunan 893,6118 Ha dan luas untuk

tegalan/ladang 80,1656 Ha dan tanah lainnya seluas 102,6258 Ha. Di Kecamatan Tasikmadu tidak terdapat hutan negara.

Kecamatan Tasikmadu terdiri dan 10 desa, 58 dusun, 80 dukuh, 86RW dan 446 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swasembada.

Tabel 2.2
Jumlah Dusun, Duku, RT dan RW

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Buran	6	6	8	49
2. Papahan	6	7	18	58
3. Ngijo	5	5	7	54
4. Gaum	5	7	11	55
5. Suruh	7	7	7	39
6. Pandeyan	6	7	8	43
7. Karangmojo	6	7	7	33
8. Kaling	6	8	9	45
9. Wonolopo	6	11	6	29
10. Kalijirak	5	15	5	41
Jumlah	58	80	86	446

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2022

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kecamatan Tasikmadu sebanyak 64.370 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 31.968 jiwa dan perempuan sebanyak 32.402 jiwa.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di
Kecamatan Tasikmadu (2021)

NO	DESA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Buran	2 665	2 723	5 388
2	Papahan	3 820	3 895	7 715
3	Ngijo	3 625	3 749	7 374
4	Gaum	3 647	3 691	7 338
5	Suruh	3 434	3 469	6 903
6	Pandeyan	2 640	2 713	5 353
7	Karangmojo	3 326	3 296	6 622
8	Kaling	3 274	3 315	6 589
9	Wonolopo	2 469	2 396	4 865
10	Kalijirak	3 068	3 155	6 223
		31 968	32 402	64 370

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2022

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
Desa

Tabel 2.6
Perincian Desa dan Kelembagaan Desa di
Kecamatan Tasikmadu (2021)

<u>Desa</u>	BPD	LMPD	TP PKK	<u>Karang Taruna</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. <u>Buran</u>	3	3	28	5
2. <u>Papahan</u>	9	13	18	16
3. <u>Ngijo</u>	3	5	21	19
4. <u>Gaum</u>	3	13	11	3
5. <u>Suruh</u>	3	3	20	6
6. <u>Pandeyan</u>	3	9	6	10
7. <u>Karangmojo</u>	3	12	15	13
8. <u>Kaling</u>	3	3	18	5
9. <u>Wonolopo</u>	3	10	12	7
10. <u>Kalijirak</u>	3	3	10	5
<u>Jumlah</u>	36	74	159	89

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2022

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP	Skor	67	69	70	73,40	Na		108	Na	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	74	75	85,106	86,17		118	115	
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	85	85	85	85	100		100	117	
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	85	85	85	85	100		100	117	
5	Persentase wilayah tertib Perda	%	85	85	85	85	100		100	117	
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	85	85	85	85	100		100	117	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar

No	Uraian	Anggaran pada tahun			Realisasi anggaran pada tahun			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINATHAN DAERAH	1.958.881.800	2.555.907.700	2.603.632.487	1.903.818,1	2.404.298.170		94,07		
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12.764,8	18.378.500	8.353.439	12.569,8	18.309.425		99,62	100	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.883,2	11.050.000	3.874.400	3.876,8	10.984.8009		99,41	100	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja Ikhtisar Kinerja SKPD	8.881,6	7.328.500	4.479.039	8.693	7.324.625		99,95		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.671.120	1.894.341.236	1.821.420.648	1.621.423,7	1.747.228.894		97,03	92,23	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.671.120	1.894.341.236	1.821.420.648	1.621.423,7	1.747.228.894		97,03	95,44	
	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		100		
	Pengolahan Data Retribusi Daerah		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		100		
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	60.185	85.226.564	66.816.240	59.863,5	84.949.200		99,47	99,67	
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1.994	5.067.000	4.870.000	1.994	5.067.000		100	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.325.800		0				
	Penyediaan bahan logistik kantor	21.893	15.034.564	11.697.240	21.571,5	14.973.200		98,53	99,59	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.588	7.230.000	5.833.200	7.588	7.230.000		100	100	
	Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.980	2.580.000	2.640.000	1.980	2.525.000		100	97,87	
	Failitasi Kunjungan tamu		36.900.000	14.740.000		36.875.000			99,93	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	26.730	18.415.000	12.575.000	26.730	18.279.000		100	99,26	
	Penatusahaan Arsip Dinamis SKPD			5.135.000						
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	20.817,5	114.900.000	45.237.500	20.805	114.665.000		99,94	99,80	
	Pengadaan Mebel		4.900.000	35.237.500		4.900.000			100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.312,5	20.000.000	10.000.000	17.300	19.800.000		99,93	99,00	
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	3.505	90.000.000		3.505			100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.000	347.720.000	404.300.000	117.168,6	340.890,8		98,46	98,73	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	19.800	19.800.000	22.700.000	17.967,6	19.060.771		90,75	96,27	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.200	327.920.000	381.600.000	98.200	326.240.000		100	99,49	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.994,5	45.341.400	56.478.500	47.987,5	43.844.880		95,99	96,70	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	32.206	29.000.000	34.145.500	30.199	27.755.380		93,77	95,71	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800	7.790.000	11.520.000	1.800	7.732.000		100	99,26	

	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	15.988,5	8.551.400	10.813.000	15.988,5	8.357.500		100	97,73	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.109,4	5.142.150	6.851.400	5.109,4	5.139.200		100	99,94	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	5.109,4	5.142.150	6.851.400	5.109,4	5.139.200		100	99,28	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standard Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	2.222,8	1.519.950	2.470.000	2.222,8	1.517.000		100	99,81	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	2.886,6	3.622.200	4.381.400	2.886,6	3.622.200		100	100	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.103,3	28.303.600	30.496.360	24.103,3	28.303.600		100	100	
	<i>Koordinasi Pemberdayaan desa</i>	7.419,9	18.331.400	19.819.200	7.419,9	18.331.400		100	100	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.419,9	10.931.400	12.761.200	7.419,9	10.931.400		100	100	
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7.400.000	7.058.000		7.400.000			100	
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	16.683,4	11.707,1	10.677.160	16.683,4	11.707,1		100	100	

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	16.683,4	9.972.200	10.677.160	16.683,4	9.972.200		100	100	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.374,2	30.960.000	36.696.000	60.374,2	30.960.000		100	100	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	58.334,2	30.960.000	36.696.000	58.334,2	30.960.000		100	100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenataras Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	58.334,2	30.960.000	36.696.000	58.334,2	30.960.000		100	100	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.257,8	69.820.800	57.907.400	26.257,8	69.770.800		100	99,93	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah</i>	26.257,8	69.820.800	57.907.400	26.257,8	69.770.800		100	99,93	
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	7.499,8	59.900.800	49.573.400	7.499,8	59.850.800		100	99,92	
	Pembinaan Antar suku dan intrasuku, Umat Beragama, ras dan golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	7.499	9.920.000	8.344.000	7.499	9.920.000		100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.593,5	19.986.000	19.075.000	15.593,5	19.441.600		100	97,27	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan</i>	15.593,5	19.986.000	19.075.000	15.593,5	19.441.600		100	97,27	

	<i>dan pengawasan Pemerintahan Desa</i>									
	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	8.895,6	19.986.000	19.075.000	8.895,6	19.441.600		100	97,27	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

2.4.1 Tantangan

- 1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- 2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
- 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

2.4.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Tasikmadu untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

- 4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tasikmadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat

- dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
- c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tasikmadu maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tasikmadu yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Tasikmadu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	1.Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan 2. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.	1. Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3.belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur. 4.masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan 5. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 6. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada dikantor kecamatan 7. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan 8. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Keuangan desa 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban a. belum optimalnya sosialisasi Perda b. belum optimalnya pembinaan Linmas desa c. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. Masih tingginya tingkat angka kemiskinan c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat. 5.Seksi Pelayanan Umum a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pembedidikan politik masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tasikmadu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			TARGET AKHIR
						2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks reformasi Birokrasi	Indeks	63	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	skor	73,40	74,5	74,7	75	75,7
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	%	9,85	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	indeks	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76

Commented [a1]: Yang diblock kuning sudah disesuaikan dengan RPD

Commented [a2]: Yang diblock kuning sudah diisi sesuai dengan RPD

Commented [a3]: Sudah disesuaikan dengan RPD

Tabel 4.2
CASCADING KINERJA KECAMATAN TASIKMADU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		
				2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			72	73	75										
		Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai saki OPD	74,5	74,7	75										
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	100	100					
												Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Cakupan Perencanaan Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	100	100
												Administrasi Keuangan Perangkat daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	100	100

												Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	100	100
												Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
												Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
												Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaa n Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	100	100
							PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,45	86,47	86,48					

												Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	100					
												Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
							PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib Perda	100	100	100					

												Penyelenggara n Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelengga raan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100
Meningkatnya Pemerataan pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka kemiskinan			8,52	8,45	8,03										
		Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,74	0,75	0,76										
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan Aktif	100	100	100					
												Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	100	100	100
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dab RKPD Des yang sesuai ketentuan	100	100	100					

Commented [a4]: Yang diblock sudah sesuai dengan RPD

												Fasilitasi,Reko mendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi,Re komendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, Peningkatan Disiplin ASN, meningkatkan kualitas arsip;
2. Meningkatkan pelayanan public melalui peningkatan kualitas pelayanan ;
3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, peningkatan keamanan dan ketertiban umum;

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Tasikmadu, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Tasikmadu yang menjadi acuan dalam menetapkan program 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN;
2. Peningkatan pengelolaan arsip;
3. Peningkatan kualitas sector pelayanan public;
4. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
5. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan

- pengecehan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan Toleransi, kerukunan antar umat beragama,wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan partisipasi politik;
 7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan desa;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel T-C.26

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, penguatan kualitas pengelolaan keuangan,peningkatan kualitas pegawai,kompetensi ASN, Peningkatan Disiplin ASN,meningkatkan kualitas arsip	1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1. Meningkatkan kualitas pembangunan desa	2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan	2. Peningkatan pengelolaan arsip
			3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama,	3. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik
				4. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaa

			etnis,peningkatan cinta tanah air, peningkatan keamanan dan ketertiban umum	n anggaran pembangunan 5.Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 6. Peningkatan Toleransi, kerukunan antar umat beragama,wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan partisipasi politik 7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan desa
--	--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerjaserta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Tasikmadu dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1). Pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangn
 - 2). Pengadaan mebelair
 - 3) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - 4). Pengadaan Aset Tetap lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pemeliharaan Mebelair
 - 3). Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2).Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1). Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 3). Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3). Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar

TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN OPD	SASA RAN OPD	INDIKAT OR SASARA N OPD	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	FORMULASI	SAT UAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKA SI	OPD PEL AKS ANA
													Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkat kan tata pemerinta han yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reforma si Birokrasi											%	72		73		75		75			
				7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.528.463.175		3.005.750.000		3.158.560.000		529.800.000		
		Meni ngkat kan kualit as tata laksa na pem	Nilai SAKIP OPD									Nilai	74,5		74,7		75		75			

		erint ahan																				
				7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikalikan 100%	%	100	2.800.000	100	2.840.000	100	2.982.000	100	8.622.000.000		
				7	0 1	0 1	2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	6	5.448.600.	6	14.000.000	6	16.000.000	6	42.000.000		
				7	0 1	0 1	2 . 0 1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dok	3	3.455,200	3	7.000.000	3	8.000.000	3	21.000.000		
				7	0 1	0 1	2 . 7	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan	Jumlah laporan capaian	dok	3	1.933.400	3	7.000.000	3	8.000.000	3	21.000.000		

							0 1			capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											
									Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Reribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Reribusi Daerah	Dok	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000				
				7	0 1	0 1	2 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bula n	12	1.986.850.956	12	2.016.350.000	12	2.225.918.000	12			
				7	0 1	0 1	2 . 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	bula n	12	1.986.850.956	12	2.005.918.000	12	2.225.918.000	12	6.218.686.95 6		
				7	0 1	0 1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bula n	12	68.640.000	12	78.800.000	12	80.950.000	12	224.390.000		
				7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan	jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan	bula n	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	21.000.000		

										bangunan kantor	bangunan kantor											
				7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	bula n	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	33.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang tersedia	bula n	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	33.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bula n	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	21.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	bula n	12	2.640.000	12	2.800.000	12	2.950.000	12	8.390.000		
				7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	bula n	12	20.000.000	12	25.000.000	12	22.000.000	12	63.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	bula n	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000	12	45.000.000		

				7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	44	16.150.000	44	209.000.000	44	129.000.000	44	350000000		
				7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	1	-	1	30.000.000	1	22.000.000	1	63.000.000		
				7	0	0	2	0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Mebeleur	unit	40	-	40	20.000.000	40	13.000.000	40	35.000.000		
				7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2	16.150.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	72.000.000		
				7	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	--	1	135.000.000	1	70.000.000	1	180.000.000		

				7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bula n	12	409.000.000		413.000.000		416.000.000	0	1.238.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	bula n	12	24.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	12	77.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	bula n	12	385.000.000	12	387.000.000	12	389.000.000	12	1.161.000.000		
				7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bula n	12	60.000.000		64.000.000		67.000.000	0	191.000.000		
				7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	bula n	12	36.000.000	12	38000.000	12	40.000.000	12	114.000.000		

				7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	bula n	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000	12	39.000.000		
				7	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		bula n	12	12.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	38.000.000		
				7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	86,45	5.600.000	86,47	6.300.000	86,48	6.615.000	86,48	18.915.000		
				7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	lapor an	14	3.100.000	14	3.700.000	14	3.915.000	14	11.115.000		
				7	0	0	2	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	lapor an	2	2.500.000	2	2.600.000	2	2.700.000	2	7.800.000		

				7	0 1	0 2	2 . 0 2	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	18.000.000		
				7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	40.000.000	100	41.000.000	100	42.000.000	100	123.000.000		

				7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	laporan	12	40.000.000	12	41.000.000	12	42.000.000	12	123.000.000		
				7	0	0	2	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	40.000.000	12	41.000.000	12	42.000.000	12	123.000.000		
				7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	59.000.000	100	61.950.000	100	65.047.500.000	100	185.997.500.000		

				7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggara aan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggara aan urusan pemerintahan umum	kegiata n	7	59.000.000	7	61.950.000	7	65.047.500	7	185.997.500		
				7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang	70	50.000.000	70	51.950.000	70	53.047.500	70	155.000.000		

				7	0	0	2	0	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	kegiata n	4	9.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000	4	30.997.500		
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan											%	8,52		8,45		8,03		8,03			
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun									Indeks	0,74		0,75		0,76		0,76			

				7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif	Jumlah lembaga kemasyaraka tan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyaraka tan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000		
				7	0	0	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Lapora n	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	75.000.000		
				7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	lembag a kemasy arakata n	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	42.000.000		
				7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat	lapora n	2	-	2	12.000.000	2	10.000.000	2	27.000.000		

[illegible]

				7	0	0	2		Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	30	30.000.000	30	31.500.000	30	33.075.00000	30	94.575.000		
				7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	10	15.000.000	10	16.000.000	10	17.000.000	10	48.000.000		
				7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	10	5.000.000	10	7.000.000	10	8.000.000	10	25.000.000		
				7	0	0	2	0	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	dokumen	10	10.000.000	10	8.500.000	10	8.075.000	10	21.575.000		

											an Perangkat Desa	an Perangkat Desa											

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tasikmadu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Inspektorat	Indek	64	65	67	70	70
2	Nilai Sakip	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah	Nilai	70	74,5	74,7	75	75
3	Angka Kemiskinan	Berdasarkan Hasil Perhitungan BPS	%	9,85	8,52	8,45	8,03	8,03
4	Indeks Desa Membangun	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes di tingkat Kecamatan	indeks	0,73	0.74	0,75	0,76	0,76

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
				2024	2025	2026	
1	Persentase Indikaotr OPD(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	Na	100	100	100	100
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,37	86,45	86,47	86,48	86,48
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	85	100	100	100	100
4	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan Keagamaan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	85	100	100	100	100
6	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

8.2 Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Tasikmadu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Tasikmadu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Tasikmadu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Tasikmadu.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Tasikmadu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Tasikmadu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tasikmadu.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Litbang dan Penyusunan Program Baperlitbang	